



Aktualisasi Isi dan Ajaran Sila-Sila dalam Pancasila untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Agnes Elsonya Damanik¹, Alvin Hariando Manik², Rachel Rosalina Sirait³, Rhyfka Arlina Bago⁴, Olivia Hana Putri Nababan⁵, Ramsul Nababan⁶.

¹⁻⁷ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan, Indonesia.

agneselsonya@gmail.com, alvinmanik91@gmail.com, rachelrosalinasirait@gmail.com,
rhyfkaarlinaa@gmail.com, oliviahpn@gmail.com, ramsulyandinbbn@gmail.com.

Abstract. *This research is entitled "Actualization of the Content and Teachings of the Principles in Pancasila to Increase Unity and Oneness in National and State Life". This study aims to analyze the problems that arise in the process of actualizing Pancasila values, especially in the context of unity amidst social diversity. Identification of problems includes low public understanding of Pancasila, minimal participation in social activities, and social injustice that hinders harmony. This study uses a qualitative approach by collecting data through literature studies and interviews. The results of the study indicate that a shallow understanding of Pancasila often causes people to emphasize differences rather than similarities, thus increasing the potential for division. In addition, the rampant inaccurate information on social media worsens the situation. This study recommends the need to increase education and socialization regarding Pancasila, as well as the development of more inclusive policies to encourage active public participation. With this, it is hoped that Pancasila can be actualized as a guideline for life that strengthens the unity of the Indonesian nation, in accordance with the spirit of Bhinneka Tunggal Ika.*

Keywords: *Pancasila, unity, togetherness, public understanding, social injustice.*

Abstrak. Penelitian ini berjudul "Aktualisasi Isi dan Ajaran Sila-Sila dalam Pancasila untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang muncul dalam proses aktualisasi nilai-nilai Pancasila, terutama dalam konteks persatuan di tengah keragaman sosial. Identifikasi masalah mencakup rendahnya pemahaman masyarakat tentang Pancasila, partisipasi yang minim dalam kegiatan sosial, serta ketidakadilan sosial yang menghambat harmoni. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui studi literatur dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang dangkal terhadap Pancasila sering kali menyebabkan masyarakat lebih menonjolkan perbedaan daripada persamaan, sehingga memperbesar potensi perpecahan. Selain itu, maraknya informasi yang tidak akurat di media sosial memperburuk situasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai Pancasila, serta pengembangan kebijakan yang lebih inklusif untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat. Dengan tersebut, diharapkan Pancasila dapat diaktualisasikan sebagai pedoman hidup yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika

Kata kunci: Pancasila, persatuan, kesatuan, pemahaman masyarakat, ketidakadilan sosial.

1. LATAR BELAKANG

Negara sebagai sarana untuk mencapai cita-cita kebangsaan memerlukan landasan yang mampu menyatukan beragam kekhasan masyarakat Indonesia. Pancasila, sebagai inti dari seluruh filosofi kebangsaan, mendasari proses pembangunan negara. Ia adalah harta tak ternilai bagi bangsa Indonesia dan mencerminkan dialog kemanusiaan di dalam diri individu sebagai makhluk monodualis.

Demokrasi, sebagai sistem yang diadopsi banyak negara, telah menjadi alternatif dalam berbagai tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penyebab utama pemilihan

demokrasi sebagai asas dalam kehidupan bernegara adalah karena hampir setiap negara di dunia mengakui demokrasi sebagai fondasi fundamental. Selain berfungsi sebagai dasar kenegaraan, demokrasi secara esensial memberikan arah pada peran masyarakat dalam menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya, sehingga pemahaman yang benar mengenai demokrasi menjadi sangat penting bagi setiap warga negara.

Nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Kesatuan, Kerakyatan, dan Keadilan saling terkait secara komprehensif dalam membangun pemahaman akan keberagaman (bhineka) kehidupan. Kenyataan keberagaman ini harus disadari dan diolah oleh negara menjadi kesatuan yang bersinergi, guna menggalang kemampuan bersama untuk menciptakan masyarakat yang adil dan Makmur.

Dalam konteks ini, Pancasila berfungsi sebagai konsepsi pemahaman bersama yang menjadi rekayasa sosial untuk menciptakan kehidupan harmonis antar umat manusia. Pancasila, dalam posisi ini, berperan sebagai bintang pemandu menuju dunia yang damai. Sebagai dasar negara, Pancasila juga merupakan sumber hukum nasional. Penting untuk dipahami dengan serius oleh seluruh bangsa Indonesia, terutama oleh pengelola negara, bahwa hal ini akan menumbuhkan tekad dan semangat untuk menjaga persatuan. Tanpa dasar hukum yang jelas, akan muncul berbagai pikiran subjektif yang dapat menimbulkan perbedaan dan perpecahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, hukum dasar yang harus diyakini adalah satu, yaitu Pancasila.

2. METODE PENELITIAN

Metode pada artikel ini menggunakan studi pustaka (library research) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Dengan pendekatan metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatannya datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian (Sahir, 2022).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rendahnya Pemahaman Masyarakat tentang Proses Perwujudan Sila Sila Pancasila dalam Meningkatkan Persatuan di Tengah Keragaman Sosial

Rendahnya pemahaman masyarakat tentang proses perwujudan sila-sila Pancasila menjadi tantangan besar dalam meningkatkan persatuan di tengah keragaman sosial. Banyak individu yang belum sepenuhnya memahami makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam

Pancasila, sehingga sulit untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, sila ketiga yang menekankan persatuan Indonesia sering kali diabaikan dalam interaksi sosial, di mana perbedaan suku, agama, dan budaya justru menjadi sumber perpecahan. Ketidakpahaman ini diperparah oleh maraknya informasi yang tidak akurat dan hoaks yang beredar di masyarakat, yang dapat memicu konflik dan ketegangan antar kelompok. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai Pancasila, agar masyarakat dapat memahami dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut, sehingga dapat berkontribusi pada terciptanya harmoni dan persatuan di tengah keragaman yang ada (Tiarlylla, Azhima, & Saputri, 2023).

Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat saling menghargai dan bekerja sama, menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam membangun bangsa yang lebih kuat dan bersatu. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang proses perwujudan sila-sila Pancasila dalam meningkatkan persatuan di tengah keragaman sosial menjadi isu yang sangat penting untuk diperhatikan. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa Pancasila bukan hanya sekadar dasar negara, tetapi juga merupakan pedoman hidup yang seharusnya diterapkan dalam interaksi sehari-hari. Ketidakpahaman ini sering kali mengakibatkan kurangnya rasa saling menghormati dan toleransi di antara berbagai kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda.

Sila ketiga Pancasila, yang berbunyi "Persatuan Indonesia," seharusnya menjadi pengingat bagi setiap individu untuk mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Namun, dalam praktiknya, banyak yang lebih memilih untuk menonjolkan perbedaan daripada mencari kesamaan. Hal ini diperburuk oleh kurangnya pendidikan yang memadai mengenai nilai-nilai Pancasila, yang seharusnya diajarkan sejak dini di lingkungan keluarga dan sekolah.

Selain itu, pengaruh media sosial yang sering kali menyebarkan informasi yang tidak akurat juga berkontribusi pada rendahnya pemahaman ini. Berita-berita yang provokatif dan hoaks dapat memicu perpecahan dan konflik antar kelompok, sehingga mengganggu upaya untuk menciptakan persatuan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih serius dari pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan literasi Pancasila, melalui program-program edukasi yang menjangkau berbagai kalangan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang Pancasila, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai keragaman dan berkontribusi pada terciptanya persatuan yang kokoh di tengah perbedaan yang ada.

Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan yang Mengedepankan Persatuan dan Kesatuan.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang mengedepankan persatuan dan kesatuan merupakan fenomena yang memprihatinkan dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu penyebab utama adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya kolaborasi dan solidaritas di antara anggota masyarakat. Banyak individu yang lebih fokus pada kepentingan pribadi atau kelompoknya, sehingga mengabaikan tanggung jawab sosial untuk berkontribusi dalam kegiatan yang bertujuan memperkuat persatuan. Selain itu, ketidakpuasan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik juga dapat mengurangi minat masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan yang bersifat kolektif. Ketidakpercayaan terhadap institusi atau penyelenggara kegiatan sering kali membuat masyarakat merasa skeptis dan enggan untuk berpartisipasi, karena mereka merasa suara dan kontribusi mereka tidak akan dihargai atau didengar (Rahmelia & Apandie, 2019).

Media sosial, meskipun dapat menjadi alat untuk menyebarkan informasi dan menggalang dukungan, juga sering kali menjadi sarana penyebaran berita negatif dan polarisasi yang dapat menghambat partisipasi. Ketika masyarakat terpapar pada konten yang memecah belah, mereka cenderung menarik diri dari kegiatan yang mengedepankan persatuan. Selain itu, kurangnya akses terhadap informasi mengenai kegiatan yang ada juga menjadi penghalang, terutama bagi kelompok masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau kurang terlayani. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang lebih intensif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal, untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan ruang bagi partisipasi aktif. Melalui pendidikan, sosialisasi, dan penyediaan platform yang inklusif, diharapkan masyarakat dapat lebih termotivasi untuk berkontribusi dalam kegiatan yang mendukung persatuan dan kesatuan, sehingga tercipta masyarakat yang lebih harmonis dan solid.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang mengedepankan persatuan dan kesatuan menjadi isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serius. Salah satu faktor yang berkontribusi adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya persatuan dalam konteks keragaman sosial. Banyak individu yang tidak menyadari bahwa partisipasi aktif dalam kegiatan kolektif dapat memperkuat ikatan sosial dan menciptakan rasa saling memiliki. Selain itu, ketidakpuasan terhadap kondisi sosial dan politik sering kali membuat masyarakat merasa apatis dan enggan untuk terlibat. Mereka mungkin merasa bahwa suara

mereka tidak akan didengar atau bahwa perubahan yang diharapkan tidak akan terwujud, sehingga memilih untuk tidak berpartisipasi (MS, 2022).

Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya akses informasi mengenai kegiatan yang ada, terutama di daerah terpencil. Masyarakat yang tidak mendapatkan informasi yang memadai cenderung tidak terlibat dalam kegiatan yang dapat meningkatkan persatuan. Selain itu, media sosial, meskipun memiliki potensi untuk menggalang dukungan, sering kali menjadi sarana penyebaran informasi yang memecah belah, yang dapat mengurangi minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan positif.

Ketidakadilan Sosial yang Menghambat Terciptanya Harmoni di Tengah Keragaman

Ketidakadilan sosial merupakan salah satu faktor utama yang menghambat terciptanya harmoni di tengah keragaman masyarakat. Ketika individu atau kelompok tertentu merasa diperlakukan tidak adil, baik dalam hal akses terhadap sumber daya, kesempatan ekonomi, pendidikan, maupun hak-hak politik, hal ini dapat menimbulkan ketegangan dan konflik di antara berbagai kelompok. Misalnya, diskriminasi berdasarkan suku, agama, atau status sosial sering kali menciptakan jurang pemisah yang mendalam, di mana kelompok yang terpinggirkan merasa diabaikan dan tidak dihargai. Ketidakadilan ini tidak hanya berdampak pada individu yang mengalami penindasan, tetapi juga dapat merusak hubungan antar kelompok, menciptakan rasa curiga, dan memperburuk stereotip negatif. Dalam konteks keragaman, ketidakadilan sosial dapat mengakibatkan polarisasi, di mana kelompok-kelompok yang berbeda semakin terpisah dan sulit untuk berkolaborasi atau berkomunikasi secara konstruktif.

Lebih jauh lagi, ketidakadilan sosial sering kali diperparah oleh sistem dan kebijakan yang tidak inklusif, yang mengabaikan kebutuhan dan aspirasi kelompok minoritas. Ketika suara mereka tidak didengar dalam pengambilan keputusan, rasa ketidakpuasan dan frustrasi akan semakin meningkat, yang pada gilirannya dapat memicu protes atau bahkan konflik terbuka (Tiarlylla, Azhima, & Saputri, 2023)

. Dalam situasi seperti ini, upaya untuk membangun harmoni menjadi semakin sulit, karena setiap kelompok lebih fokus pada perjuangan untuk mendapatkan keadilan dan pengakuan daripada mencari titik temu. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk secara aktif mengatasi ketidakadilan sosial dengan menciptakan kebijakan yang adil dan inklusif, serta mempromosikan dialog antar kelompok. Dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih harmonis, di mana setiap individu merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk

berkontribusi dalam pembangunan masyarakat yang beragam.

Ketidakadilan sosial yang menghambat terciptanya harmoni di tengah keragaman adalah isu yang kompleks dan mendalam, yang memerlukan perhatian serius dari semua elemen masyarakat. Ketika ketidakadilan terjadi, baik dalam bentuk diskriminasi, marginalisasi, atau ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya, hal ini dapat menciptakan ketegangan yang merusak hubungan antar kelompok. Misalnya, kelompok-kelompok yang merasa terpinggirkan sering kali mengalami frustrasi dan kemarahan, yang dapat memicu konflik dan memperburuk perpecahan di dalam masyarakat. Ketidakadilan sosial tidak hanya berdampak pada individu yang mengalami penindasan, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sosial secara keseluruhan, karena menciptakan rasa ketidakpuasan yang meluas.

Dalam konteks keragaman, ketidakadilan sosial sering kali memperkuat stereotip dan prasangka negatif, yang semakin memperburuk hubungan antar kelompok. Ketika satu kelompok merasa diuntungkan sementara kelompok lain merasa dirugikan, hal ini dapat menciptakan jurang pemisah yang sulit dijembatani. Selain itu, ketidakadilan yang sistemik, seperti dalam akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, dapat mengakibatkan ketidaksetaraan yang berkepanjangan, di mana kelompok-kelompok tertentu terus-menerus terjebak dalam siklus kemiskinan dan ketidakberdayaan.

Oleh karena itu, untuk menciptakan harmoni di tengah keragaman, sangat penting untuk mengatasi ketidakadilan sosial dengan cara yang komprehensif. Ini termasuk menciptakan kebijakan yang adil dan inklusif, mempromosikan kesetaraan hak, serta memberikan ruang bagi dialog dan partisipasi semua kelompok dalam proses pengambilan keputusan. Dengan mengedepankan keadilan dan kesetaraan, diharapkan masyarakat dapat membangun hubungan yang lebih baik, saling menghargai, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, sehingga tercipta harmoni yang berkelanjutan di tengah keragaman yang ada.

Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Pancasila

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan masalah yang cukup serius dan berpotensi mengganggu stabilitas sosial serta persatuan di tengah keragaman yang ada. Pancasila, yang terdiri dari lima sila yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa, seharusnya menjadi pedoman dalam berperilaku dan berinteraksi antar sesama warga negara. Namun, banyak individu yang tidak sepenuhnya memahami makna dan esensi dari setiap sila, sehingga sulit untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, sila pertama yang menekankan pada ketuhanan yang maha esa sering kali diinterpretasikan secara sempit, sehingga mengabaikan

pentingnya toleransi antar umat beragama. Selain itu, sila kedua yang berbicara tentang kemanusiaan yang adil dan beradab sering kali tidak diindahkan dalam praktik, di mana masih banyak terjadi diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia (Yudhayarta, 2020).

Kurangnya pemahaman ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk rendahnya kualitas pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai Pancasila, minimnya sosialisasi yang efektif, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam diskusi dan kegiatan yang berkaitan dengan Pancasila. Di era digital saat ini, informasi yang beredar di media sosial sering kali tidak akurat dan dapat menyesatkan, sehingga masyarakat lebih mudah terpengaruh oleh narasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini semakin memperburuk situasi, karena masyarakat cenderung mengabaikan pentingnya Pancasila sebagai landasan dalam membangun karakter bangsa yang kuat dan bersatu. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta masyarakat yang lebih harmonis, toleran, dan saling menghargai, serta mampu menghadapi tantangan keragaman dengan semangat persatuan.

Persatuan Indonesia merupakan konsep penyatuan seluruh elemen masyarakat dalam satu kesatuan nasional. Dalam konteks keberagaman budaya, persatuan Indonesia berarti kemampuan masyarakat untuk hidup bersama di tengah keragaman budaya yang ada. Hal ini mencakup kehidupan yang harmonis, damai, serta sikap saling menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan budaya satu sama lain. Saat ini, tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam mewujudkan persatuan di tengah keberagaman sosial. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara perlu terus diupayakan untuk mencegah terjadinya perpecahan yang dapat merugikan individu maupun negara Indonesia secara keseluruhan.

Dalam upaya memastikan persatuan di tengah masyarakat yang beragam, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan yang mendukung terciptanya persatuan dalam keberagaman sosial, antara lain:

1. Sila Ketiga Pancasila (Persatuan Indonesia)

Sila ketiga berfungsi sebagai panduan bagi seluruh warga negara. Masyarakat Indonesia diharapkan dapat mengutamakan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Mengutamakan bangsa dan negara mencerminkan kerelaan berkorban yang didorong oleh rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme. Untuk menumbuhkan sikap ini, penting bagi kita mengembangkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam konteks

memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Implementasi sila ketiga dapat diwujudkan dengan merayakan perbedaan yang mengarah pada kesatuan, sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna berbeda-beda tetapi tetap satu. Dengan menciptakan budaya tolong-menolong di antara keberagaman, kehidupan yang harmonis antar masyarakat Indonesia dapat terwujud. Sila ketiga memberikan ruang untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa (Silalahi, 2020).

2. Pembukaan UUD 1945 Alinea II

Pembukaan UUD 1945 alinea kedua menegaskan bahwa negara Indonesia yang bersatu merupakan hasil perjuangan kemerdekaan yang telah membawa rakyat Indonesia menuju gerbang kemerdekaan dan perwujudan cita-cita kemerdekaan. Pada alinea keempat, ditegaskan bahwa negara bertugas melindungi seluruh bangsa dan tanah air Indonesia berdasarkan prinsip persatuan (Kerebungu & Fathimah, 2022).

3. UUD 1945 Pasal 1

Pasal ini menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik.

4. UUD 1945 Pasal 32 Ayat 1

Pasal ini menekankan peran negara dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia dalam konteks global sambil menjamin kebebasan masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya mereka sendiri.

5. Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000

Ketetapan ini berkaitan dengan pemantapan persatuan dan kesatuan nasional.

6. Keputusan Presiden Nomor 140 Tahun 1963

Kebijakan ini mendukung peningkatan persatuan di tengah keberagaman sosial melalui pembentukan Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa.

Di antara berbagai kebijakan tersebut, Pancasila memiliki peran paling penting. Pancasila harus menjadi pedoman dan falsafah hidup setiap warga dalam kehidupan sehari-hari. Sila ketiga Pancasila dalam konteks keberagaman bangsa mewujudkan konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang mempersatukan perbedaan suku, ras, etnis, agama, budaya, dan kondisi geografis dalam satu kesatuan. Setiap kelompok masyarakat pada dasarnya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa aktualisasi nilai-nilai Pancasila, terutama sila ketiga "Persatuan Indonesia," sangat penting dalam menjaga dan memperkuat persatuan di tengah keberagaman sosial. Permasalahan utama yang diidentifikasi meliputi rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, kurangnya partisipasi aktif dalam kegiatan sosial yang mendukung persatuan, serta ketidakadilan sosial yang memperburuk ketegangan antar kelompok. Pemahaman yang dangkal terhadap Pancasila sering kali membuat masyarakat lebih menonjolkan perbedaan dibandingkan persamaan, sehingga memperbesar potensi perpecahan. Selain itu, maraknya informasi menyesatkan dan hoaks di media sosial semakin memperburuk situasi dengan memicu prasangka dan memperkeruh hubungan sosial. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang bertujuan mendukung persatuan, seperti ketentuan dalam UUD 1945 dan ketetapan MPR yang menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai tersebut masih belum optimal.

Pada akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya sekadar dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang harus diaktualisasikan dalam perilaku sehari-hari. Untuk mewujudkan persatuan yang kokoh, diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak pemerintah, masyarakat, serta organisasi sosial dalam membangun pemahaman yang lebih mendalam, menciptakan kebijakan yang lebih adil, dan membuka ruang partisipasi yang lebih luas. Upaya bersama ini diharapkan mampu mewujudkan masyarakat yang harmonis, saling menghargai, dan bersatu dalam perbedaan, sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

SARAN

Pemerintah dan institusi pendidikan perlu memperkuat kurikulum yang membahas Pancasila secara lebih aplikatif agar masyarakat, terutama generasi muda, lebih mudah memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan

sehari-hari. Selain itu, peran media, khususnya media sosial, harus dioptimalkan untuk menyebarluaskan konten edukatif yang mendorong semangat persatuan serta melawan hoaks dan narasi negatif yang memicu perpecahan. Dukungan konkret dari pemerintah dan organisasi sosial juga sangat diperlukan untuk membantu komunitas seperti "Saudara Persatuan" berkembang, baik melalui penyediaan fasilitas, pelatihan, maupun bantuan pendanaan, agar kegiatan yang bertujuan mempererat persatuan dapat berjalan secara berkelanjutan.

5. DAFTAR REFERENSI

- Indriani, J., Aisyah, N., & Trisno, B. (2024). Pancasila sebagai dasar negara. *KONSENSUS: Jurnal ilmu pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 104-114.
- Kerebungu, F., & Fathimah, S. (2022). Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 Melalui Pendidikan Multikultural. *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum UMS*, 76-86.
- MS, W. (2022). Aktualisasi pancasila dalam etika berbangsa dan bernegara. *Prosiding Seminar Proposal Nasional Program Doktor Ilmu Hukum UMS*, 62-73.
- Pertiwi, A. D., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Nilai Pancasila Sebagai Landasan Bhineka Tunggal Ika. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 212-219.
- Rahmelia, S., & Apandie, C. (2019). Merajut Kerukunan Dalam Keberagaman: Praksis Pancasila. *Prosiding Seminar Nasional Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya*, 1-9. Retrieved from <http://prosiding.iahntp.ac.id>
- Sahir, S. H. (2022). *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: KBM INDONESIA.
- Sari, F. L., & Najicha, F. U. (2022). NILAI-NILAI SILA PERSATUAN INDONESIA DALAM KEBERAGAMAN KEBUDAYAAN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(1), 79-84. doi:<http://dx.doi.org/10.33061/jgz.v11i1.7469>
- Silalahi, W. (2020). MEMBANGUN NILAI DAN KARAKTER PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT. *Webinar Nasional "Membangun Karakter Kebangsaan Sesuai Etika Pancasila*, 19-33.
- Sukowati, A. P., & Febrianti, R. T. (2021). MENINGKATKAN KESADARAN BELA NEGARA DENGAN MENGAMALKAN NILAI-NILAI PANCASILA DI ERA GLOBALISASI. *JKEPMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 184-193. doi:<https://doi.org/10.3342/jkepmas.v1i2.143>
- Tiarlylla, D. S., Azhima, L. U., & Saputri, Y. A. (2023). Pancasila sebagai dasar negara di Indonesia. *Indigenous Knowledge*, 2(4), 277-282.
- Yudhayarta, D. Y. (2020). Pemberdayaan etika pancasila dalam konteks kehidupan kampus. *Al-Liqo: Jurnal pendidikan Islam*, 5(), 43-62.